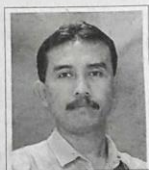


# Ekonomi Kelembagaan

## Kelemahan Institusional Pertanian Organik



L. Bambang Harnoto, M.Si,  
Ekonom di Universitas Sanata  
Dharma Yogyakarta

**P**ersoalan yang selalu muncul menjelang Lebaran adalah harga kebutuhan pokok melonjak, tak terkecuali harga beras. Beras menjadi makanan pokok terpenting bagi masyarakat Indonesia, tetapi tidak memberi daya tarik sebagian besar masyarakat untuk mengikuti pertaniannya. Dunia pertanian, bagi sebagian orang seakan memberi gambaran masa depan suram, udik, kotor, dan lekat dengan citra miskin. Image ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Simak saja data BPS pada 2016. Dalam data BPS itu, prosentase penduduk miskin Indonesia 7,79% di kota dan

14,11% di desa. Dari 14,11% masyarakat miskin di desa, 65,62%-nya berasal dari sektor pertanian.

Secara sosiologis, urbanisasi menjadi pilihan paling rasional bagi kalangan muda, sekaligus menciptakan desa sebagai daerah sunyi dengan sumber daya dan potensi lokal yang terkurai lemah tak berdaya.

Mekanisme pasar juga memperparah situasi. Di hulu, petani dihadapkan pada struktur pasar oligopolistik yang cenderung menciptakan harga rigid ke bawah. Sementara, di hilir, produk pertanian sangat rentan terhadap hukum permintaan-penawaran, di mana panen raya harga cenderung jatuh.

Stingkat cerita, dunia pertanian dan posisi petani tidak berdaya, dan hampir semua risiko yang dihadapi petani ada di luar batas kekuasaannya.

Sesungguhnya dunia pertanian menyimpan potensi kewirausahaan yang menarik. Contohnya, bertolak dari situasi kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia yang masif, muncul cara alternatif yang lebih ramah

lingkungan. Ada pula fenomena pertanian organik yang kini cukup populer di sejumlah kawasan terutama di Pulau Jawa.

Pemerintahan Joko Widodo rasanya sudah tepat ketika membangun berbagai fasilitas pertanian yang menunjang cita-cita peningkatan hasil pertanian nasional, khususnya peningkatan jaringan irigasi 1 juta hektare (ha), dan rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi.

Kucuran Dana Desa yang digagas pemerintah juga menjadi poin penting menuju pemberdayaan sektor pertanian yang menjadi tempat terbesar bercokolnya kemiskinan khususnya di pedesaan. Ini sejalan pula dengan konsep Jalan Perubahan Jokowi-JK yaitu kemandirian yang menyejahterakan dan Revolusi Mental.

Tapi, pengembangan pertanian organik tak cukup sebatas pembenahan teknik mengelola pertanian. Yang lebih perlu disasar adalah perihal gaya hidup, tata nilai, dan pranata sosial yang ada di masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari gerakan revolusi mental,

yang bersumber dari perubahan cara berpikir dan bertindak.

Beberapa prioritas yang bisa dilakukan untuk menguatkan kelembagaan pertanian organik yakni pertama, mindset orang terhadap citra pertanian yang tanpa harapan dan tanpa masa depan harus dirombak. Masa depan tidak identik dengan hidup di kota. Perlu dibangun image sejak kecil bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kuat. Perubahan mindset ini akan efektif jika dilakukan lewat media pendidikan.

Kedua, keberpihakan pemerintah terhadap pertanian menjadi keniscayaan terutama pada kebijakan campur tangan dalam mekanisme pasar. Keberpihakan yang sesungguhnya adalah menjamin tercapainya tujuan akhir dari kebijakan tersebut melalui usaha terus menerus, memonitor, mengevaluasi, dan mencari solusi baru.

Ketiga, pendekatan pengembangan sektor pertanian perlu mempertimbangkan, mendengar, mengapresiasi serta mengikutsertakan pendapat, masukan, dan keinginan para petani.

Keempat, pemberdayaan kelembagaan pertanian organik seperti kelompok tani, sertifikasi nasional dan internasional, perbankan, akademisi, pemerintah pusat, daerah, eksportir, lembaga pemasar dan keberpihakan menjadi niatan paling mendasar dalam rangka menjadikan sektor pertanian sebagai ikon menuju kemakmuran seluruh bangsa.

Kelima, bangga akan Indonesia, cinta produk Indonesia, menghayati budaya Indonesia, berfikir, gaya hidup, dan cara bertindak orang Indonesia yang dijiwai oleh sila Pancasila melalui gerakan indoktrinasi dan ideologisasi menjadi kunci lain untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur melalui kemandirian pangan.



# Kontari

Harian Bisnis & Investasi

Rabu, 14 Juni 2017

3065/tahun 11, 24 halaman